

**LAPORAN MAGANG  
DI LSM/NGO SOMASI NTB**



**Disusun Oleh :  
KRISNA FEBRIANSYAH  
2020B1D036**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAAHAN

LAPORAN MAGANG

SOMASI NTB

DISUSUN OLEH

KRISNA FEBRIANSYAH

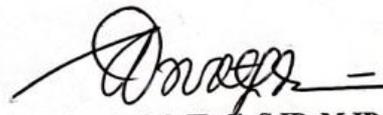
2020B1D036

Disetujui

**DIREKTUR**

  
Dwi Arie Santto

**DOSEN PEMBIMBING**

  
Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP  
NIDN. 0816057902

Mengetahui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

  
Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP  
NIDN. 0827118801  
FISIPOL

## **KATA PENGANTAR**

Kepada Bapak/Ibu Pimpinan dan Seluruh Tim di SOMASI, Saya dengan senang hati ingin menyampaikan laporan magang selama 2 bulan di lembaga atau instansi ini. Saya merasa sangat beruntung mendapatkan kesempatan untuk bisa berkontribusi dalam mengembangkan ilmu dan mempelajari proses kerja yang terjadi di SOMASI. Selama magang, saya diberikan tugas-tugas yang menantang dan membuat saya belajar banyak. Saya berterima kasih kepada seluruh rekan kerja yang membimbing dan memberikan dukungan selama proses magang berlangsung. Pengalaman yang saya dapatkan selama magang ini sangat berharga dan akan menjadi bekal penting untuk karir saya di masa depan. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan dan pengalaman yang berharga ini. Saya berharap dapat terus menjalin hubungan baik dengan SOMASI di masa depan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 29 Maret 2023 penulis

Krisna Febriansyah

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Ruang lingkup .....	1
1.3 Lokasi dan Waktu magang .....	2
1.4 Tujuan dan Manfaat magang .....	3

BAB II DESKRIPSI LEMBAGA/INSTANSI.....	
6	
2.1 PROFIL.....	
6	
2.1.1 Sejarah Somasi NTB .....	
6	
2.1.2 Gambaran umum Somasi NTB .....	
7	
2.1.3 Tujuan dan sasaran Somasi NTB .....	
8	
2.1.4 Visi dan misi Somasi NTB .....	
10	
2.2 STRUKTUR ORGANISASI.....	
11	
BAB III PELAKSANAAN MAGANG.....	
15	
3.1 KEGIATAN MAHASISWA.....	
15	
3.2 URAIAN TUGAS .....	
15	
3.3 HAL-HAL YANG DI PEROLEH.....	
15	
3.4 KENDALA.....	
30	
BAB IV PENUTUP.....	
32.....	

4.1 KESIMPULAN.....	
32	
4.2 SARAN.....	
32	
- LAMPIRAN.....	
33	

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Solidaritas masyarakat untuk transparansi berasal dari kebutuhan untuk menjamin akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga dan organisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Dalam banyak kasus, terdapat kecurigaan atau ketidakpercayaan publik terhadap kegiatan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah, bisnis, atau organisasi lainnya yang tidak transparan. Solidaritas masyarakat untuk transparansi juga dapat dipicu oleh skandal atau kontroversi yang melibatkan lembaga atau organisasi tertentu. Misalnya, skandal korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik atau korporasi dapat memicu tuntutan publik untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

### **1.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup solidaritas masyarakat untuk transparansi meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk:

1. Pemerintahan: Solidaritas masyarakat untuk transparansi dalam pemerintahan meliputi tuntutan untuk akses terhadap informasi publik, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program pemerintah.
2. Bisnis: Solidaritas masyarakat untuk transparansi dalam bisnis meliputi tuntutan untuk keterbukaan informasi mengenai praktik bisnis dan dampaknya terhadap

masyarakat dan lingkungan, serta akuntabilitas dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

3. Media: Solidaritas masyarakat untuk transparansi dalam media meliputi tuntutan untuk kebebasan pers, akses terhadap informasi publik, serta transparansi dalam membangun narasi atau opini yang disampaikan kepada publik.
4. Organisasi nirlaba: Solidaritas masyarakat untuk transparansi dalam organisasi nirlaba meliputi tuntutan untuk keterbukaan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana sumbangan dan program yang dijalankan, serta transparansi dalam menjalankan tanggung jawab sosial.
5. Pendidikan: Solidaritas masyarakat untuk transparansi dalam pendidikan meliputi tuntutan untuk keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program pendidikan, serta akuntabilitas dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam keseluruhan aspek kehidupan tersebut, solidaritas masyarakat untuk transparansi meliputi tuntutan untuk akses terhadap informasi yang relevan dan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta akuntabilitas dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Solidaritas masyarakat untuk transparansi menjadi semakin penting dalam era digital, di mana akses terhadap informasi semakin mudah dan pentingnya integritas dan transparansi semakin dihargai.

### **Lokasi dan Waktu Magang**

Praktik melaksanakan Magang pada LSM Somasi NTB. Berikut

adalah data lembaga tempat pelaksanaan magang di lakukan :

Nama Instansi : Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi  
(Somasi NTB)

Alamat : Jl. Pariwisata No. 17, Monjok, Kec. Selaparang,  
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia 83122

Telepon/Fax : (0370) 7841717

Email : somasintb1@gmail.

- **Waktu magang**

Magang di laksanakan selama 2 (dua) bulan, terhitung dari 31 januari 2023- 30 Maret 2023. Dalam melaksanakan praktek kerja lapangan waktu yang di tentukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu senin – kamis pukul 07 : 00 s.d 16 : 00 WIB. Jum’at pukul 07 : 00 s.d 17 : 00 WIB.

**Tabel 1 jadwal kehadiran Mahasiswa Magang**

Hari	Jam masuk/ jam keluar	keterangan
Senin	09: 00 – 17.00	Hadir
Selasa	09 : 00 – 17.00	
Rabu	09 : 00 – 17.00	Hadir
Kamis	09 : 00 – 17.00	
Jum’at	09 : 00 – 17.00	Hadir
Sabtu	Libur	Libur
Minggu	Libur	Libur

**Sumber : Kantor Somasi NTB Tahun 2023**

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Magang**

#### **- Tujuan Magang**

Tujuan utama dari magang solidaritas masyarakat untuk transparansi adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, magang ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mahasiswa terhadap pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan kegiatan di berbagai lembaga dan organisasi.

#### **- Manfaat Magang**

Program magang ini memiliki manfa'at yang besar. Adapun manfaa't magang tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mahasiswa dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas.
- b. Memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan praktisi dan aktivis di bidang transparansi dan akuntabilitas.
- c. Menambah pengalaman kerja dan keterampilan profesional mahasiswa.
- d. Memberikan peluang untuk mengembangkan jaringan dan hubungan di bidang transparansi dan akuntabilitas.
- e. Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan kegiatan di berbagai lembaga dan organisasi.
- f. Magang di Somasi NTB juga dapat membantu mahasiswa

untuk menambah pengetahuan praktis dalam bidang yang diminatinya. Mahasiswa akan belajar tentang proses kerja dan teknologi terbaru dalam industri yang sedang berkembang.

- g. Membangun Jaringan Selama magang di Somasi NTB, mahasiswa akan bertemu dengan orang-orang dari berbagai profesi dan latar belakang. Hal ini dapat membantu mahasiswa membangun jaringan dan memperluas relasi untuk kepentingan masa depannya.
- h. Meningkatkan Keterampilan Interpersonal Magang di Somasi NTB juga dapat membantu meningkatkan keterampilan interpersonal mahasiswa. Mahasiswa akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya, serta bagaimana berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan dalam lingkungan kerja yang profesional.
- i. Magang di Somasi NTB dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Dengan berada di lingkungan kerja yang sesungguhnya, mahasiswa akan belajar mengatasi tantangan dan menghadapi situasi yang tidak terduga, sehingga dapat memperkuat kemampuan dan kepercayaan dirinya.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI LEMBAGA/INSTANSI**

#### **2.1 Profil**

##### **2.1.1 Sejarah Somasi NTB**

Somasi NTB atau Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi adalah sebuah gerakan sosial yang berbasis di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Indonesia. Gerakan ini bermula pada tahun 2017 ketika sekelompok masyarakat di NTB, terutama di kota

Mataram, merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah setempat yang dianggap tidak transparan. Pemicu dari gerakan ini adalah kebijakan pemerintah NTB yang tidak transparan dalam pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) pada tahun 2017. Banyak masyarakat yang merasa bahwa bansos yang seharusnya diberikan kepada mereka sebagai penerima manfaat tidak sampai ke tangan mereka. Mereka merasa bahwa pemerintah NTB telah gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai bentuk protes, masyarakat kemudian membentuk Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi NTB) yang bertujuan untuk memperjuangkan transparansi dalam pengelolaan dana publik di NTB. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh provinsi NTB dan berhasil menarik perhatian publik serta media nasional. Somasi NTB kemudian melakukan aksi-aksi protes seperti unjuk rasa, aksi mogok makan, dan kampanye di media sosial untuk menuntut pemerintah NTB agar lebih transparan dalam pengelolaan dana publik. Gerakan ini juga berhasil menggalang dukungan dari berbagai pihak seperti aktivis, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Akhirnya, pada tahun 2018, pemerintah NTB akhirnya memberikan respons terhadap tuntutan Somasi NTB dengan membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap pengelolaan dana publik di NTB.

**Sumber : website Somasi NTB [www.somasintb.org](http://www.somasintb.org) diakses pada 29 maret 2023 pukul 19:40**

SOMASI NTB adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 2010 dan fokus pada pengawasan terhadap pemerintah daerah, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan. Tujuan utama SOMASI NTB adalah untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran publik dilakukan secara efisien, efektif,

dan sesuai dengan aturan yang berlaku. SOMASI NTB memiliki beberapa program dan kegiatan untuk mencapai tujuannya, termasuk monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran, pelatihan dan bimbingan untuk masyarakat dalam memahami hak-hak mereka untuk mendapatkan informasi publik, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

### **2.1.2 Gambaran Somasi NTB**

Somasi NTB atau Somasi Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meminta transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah setempat terkait dengan penggunaan anggaran dan program-program pembangunan di daerah mereka. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap adanya dugaan penyelewengan anggaran dan ketidaktransparan dalam pengelolaan program pembangunan di NTB. Masyarakat merasa bahwa mereka tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi-informasi penting mengenai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga mereka tidak dapat mengetahui secara pasti apakah program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Melalui somasi NTB atau somasi solidaritas masyarakat untuk transparansi, masyarakat meminta pemerintah daerah untuk lebih terbuka dan transparan dalam mengelola anggaran dan program-program pembangunan di NTB. Masyarakat juga menuntut agar pemerintah daerah memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dalam hal akuntabilitas dan pengawasan penggunaan anggaran publik. Gerakan somasi NTB ini merupakan contoh dari bagaimana masyarakat dapat memainkan peran yang penting dalam memastikan bahwa pemerintah melakukan tindakan yang transparan dan akuntabel. Melalui gerakan ini, masyarakat dapat

memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan informasi dan pengawasan yang tepat terhadap program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah..

### **2.1.3 Tujuan dan Sasaran Somasi NTB**

#### **a. Tujuan**

Tujuan somasi adalah untuk meminta transparansi dan akuntabilitas dari pihak yang terkait dengan peristiwa atau permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam banyak kasus, somasi NTB atau somasi Solidaritas Masyarakat NTB dilakukan ketika pihak yang terkait dengan peristiwa atau permasalahan tersebut dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi atau tidak bersedia mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Dalam hal ini, somasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menekan pihak yang terkait agar memberikan jawaban atau informasi yang jelas terkait peristiwa atau permasalahan yang sedang dihadapi.

Dengan somasi, masyarakat atau individu yang terlibat dalam kasus tersebut juga dapat menunjukkan keberanian dan solidaritas mereka dalam membela hak-hak mereka. Melalui somasi, mereka dapat menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam terhadap ketidakadilan atau tindakan yang merugikan kepentingan mereka dan lingkungan sekitar. Dalam konteks somasi NTB (Nusa Tenggara Barat), tujuan umumnya adalah untuk memberikan peringatan resmi kepada pihak yang dianggap melakukan tindakan yang merugikan atau tidak adil terhadap pihak pengirim surat. Somasi dapat mencakup permintaan untuk memperbaiki kesalahan, memberikan kompensasi atau ganti rugi, atau menghentikan tindakan yang dianggap merugikan. Dalam hal solidaritas masyarakat untuk transparansi, somasi dapat digunakan sebagai upaya untuk memperjuangkan hak transparansi informasi dan akuntabilitas pemerintah atau institusi lainnya yang

memiliki kewajiban untuk memberikan informasi publik. Dalam hal ini, somasi dapat digunakan sebagai langkah awal sebelum mengambil tindakan hukum yang lebih serius untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Secara umum, tujuan somasi adalah untuk mencari jalan damai dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau memperjuangkan hak-hak yang dianggap penting. Dalam konteks somasi NTB atau solidaritas masyarakat untuk transparansi, tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran dan memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan cara yang damai dan terhormat.

#### b. Sasaran

Sasaran somasi NTB atau solidaritas masyarakat untuk transparansi dapat bervariasi tergantung pada kasus yang sedang diperjuangkan. Namun, secara umum, sasaran somasi adalah pihak yang dianggap melakukan tindakan yang merugikan atau tidak adil terhadap pihak pengirim surat atau masyarakat yang memperjuangkan hak transparansi informasi dan akuntabilitas pemerintah atau institusi lainnya. Dalam konteks somasi NTB, sasaran somasi bisa berupa individu, kelompok atau institusi yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan pihak pengirim surat. Sasaran somasi bisa berupa perusahaan, pemerintah daerah, atau lembaga pemerintah lainnya yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diperjuangkan. Dalam konteks solidaritas masyarakat untuk transparansi, sasaran somasi bisa berupa lembaga pemerintah atau institusi yang tidak memberikan akses informasi publik atau melanggar hak transparansi masyarakat. Sasaran somasi juga bisa berupa pihak-pihak yang menghalang-halangi proses transparansi dan akuntabilitas pemerintah atau institusi lainnya. Dalam kedua kasus tersebut, sasaran somasi adalah pihak yang dianggap bertanggung jawab atas permasalahan yang sedang diperjuangkan dan diharapkan dapat memberikan tanggapan yang memuaskan bagi pihak pengirim

surat atau masyarakat yang memperjuangkan hak transparansi.

#### **2.1.4 Visi dan Misi**

##### **a. Visi**

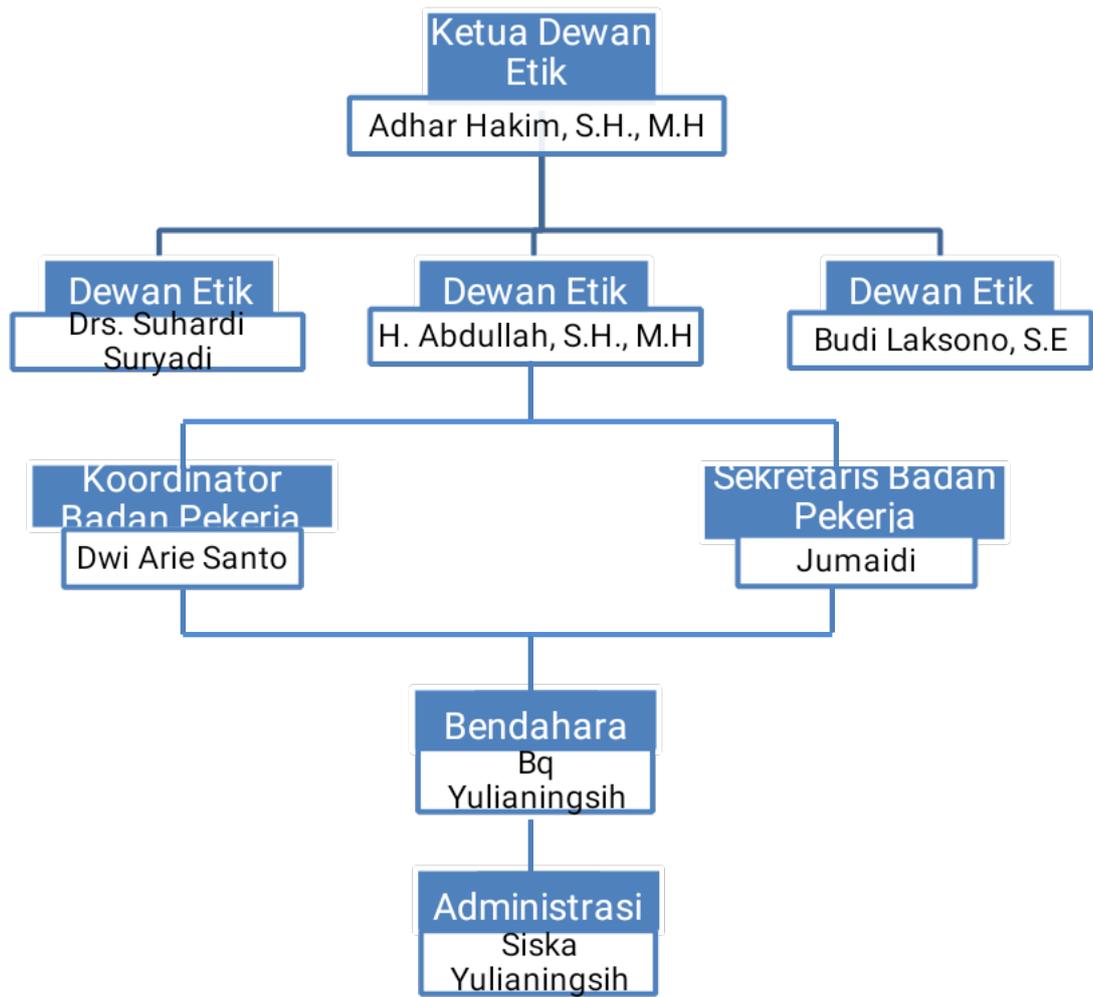
Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel yang secara efektif menjadi alat perjuangan rakyat membangun tatanan sosial yang adil secara ekonomi, demokratis secara politik dan setara secara sosial. Yang dimaksud adil secara ekonomi adalah, segala sumberdaya ekonomi dikuasai oleh rakyat dan negara untuk tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan menolak adanya dominasi segelintir konglomerat serta eksploitasi kapitalisme global. Yang dimaksud demokratis secara politik adalah rakyat memiliki bargaining yang kuat dalam menentukan struktur pemerintahan dan kebijakan yang dihasilkan. Yang dimaksud setara secara sosial adalah pola relasi sosial yang meniadakan diskriminasi gender, ras, suku, agama dan sebagainya.

##### **b. Misi**

1. Penguatan masyarakat sipil untuk advokasi korupsi dan kebijakan publik yang berorientasi kepada peningkatan Kesejahteraan rakyat miskin dan perempuan.
2. Mendorong reformasi kebijakan publik dan perbaikan pelayanan publik yang berorientasi kebutuhan rakyat miskin dan perempuan
3. Mendorong reformasi hukum yang meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan tersedianya akses keadilan bagi rakyat miskin dan perempuan
4. Mempengaruhi perubahan sistem politik yang lebih menjamin lahirnya penyelenggara negara yang bersih dan kapable, serta perbaikan representasi politik dan akuntabilitas politik kepada rakyat.

**Sumber : website Somasi NTB [www.somasintb.org](http://www.somasintb.org) diakses pada 29 maret 2023 pukul 19:40**

### 2.1.5 Struktur Organisasi Somasi NTB. Gambar 1



## **Sumber : Profile Somasi NTB Tahun 2023**

### Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pekerja SOMASI-NTB

#### 1. Koordinator Badan Pekerja

- Melaksanakan kebijakan umum perkumpulan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Etik.
- Menetapkan bentuk dan susunan pengurus dan manajemen organisasi
- Mengangkat dan memberhentikan staf/anggota Badan Pekerja.
- Menyusun program dan anggaran tahunan perkumpulan.
- Memberikan laporan tahunan program dan keuangan kepada dewan etik.
- Menetapkan peraturan keuangan dan peraturan lainnya untuk menjaga kelangsungan dan kekayaan perkumpulan.
- Mengkoordinir seluruh kegiatan yang dikelola oleh divisi, bagian dan staf
- Melakukan supervise pelaksanaan tugas dan wewenang tiap divisi.

#### 2. Sekretaris Badan Pekerja

- Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinator Badan Pekerja SOMASI NTB.
- Mengkoordinir proses administrasi, rumah tangga dan dokumentasi kantor Bertanggung jawab kepada Koordinator Badan Pekerja.
- Mendesain manajemen administrasi, dokumentasi dan publikasi secara umum.

- Melakukan supervise kepada divisi dalam kaitannya dengan proses manajerial, administrasi, dokumentasi dan lain-lain.
- Mendesain system kepegawaian dan rekrutmen staf.
- Melakukan pengawasan kinerja Bendahara, Kasir, Administrasi dan Divisi dan mengawal pelaksanaan kode etik.

### 3. Bendahara

- Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinator Badan Pekerja SOMASI NTB khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan.
- Mengkoordinir proses administrasi, pelaporan keuangan.
- Bertanggungjawab kepada Koordinator Badan Pekerja.
- Mendesain manajemen administrasi, dan keuangan secara umum.
- Melakukan supervise kepada divisi dalam kaitannya dengan proses manajerial keuangan, dan administrasi, dokumentasi dan lain-lain.
- Mendesain system pelaporan keuangan.
- Melakukan pengawasan kinerja staff khususnya terkait dengan keuangan.
- Dibantu Kasir mencatat pengeluaran kas kecil.
- Dibantu kasir menyusun seluruh laporan kas kecil.
- Dibantu kasir mengelola keuangan dan akuntansi.
- Dibantu bagian administrasi untuk menyelesaikan urusan surat

menyurat baik eksternal dan internal.

- Dibantu bagian administrasi menyusun konsep format resmi system
- administrasi yang melambangkan identitas lembaga (desain logo, alamat surat, jenis surat resmi, penggunaan font, tanda tangan, stempel, nomor surat, dll).
- Dibantu bagian administrasi menata-usahakan administrasi arsip surat, laporan, dokumen, buku, asset dan personal badan pekerja dan staf.
- Dibantu bagian administrasi mencatat buku bank, utang/piutang dan uang muka.
- Dibantu bagian administrasi melakukan verifikasi laporan uang muka.
- Dibantu bagian administrasi mencatat dan mengadministrasikan seluruh asset perkumpulan.
- Dibantu bagian administrasi menyiapkan seluruh administrasi keuangan (cek, slip gaji, slip transfer, form uang muka, dll).

#### 4. Divisi-Divisi

- Membantu Koordinator Badan Pekerja untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan Tupoksi divisi.
- Melakukan pemantauan kinerja Aparat Penegak Hukum, DPRD dan Birokrasi.
- Menerima pengaduan terkait kinerja Aparat penegak hukum, Birokrasi, DPRD dan kasus-kasus korupsi.

- Melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kasus korupsi.
- Melakukan pendokumentasian dan kampanye baik dalam bentuk release, opini, aksi simpatik yang bertujuan untuk mempengaruhi Publik.
- Menyusun laporan setiap kegiatan dan lapor

Sumber: Profile Somasi NTB 2023

## BAB III

### PELAKSANAAN MAGANG

#### 3.1 Kegiatan Mahasiswa

Tabel 2 Pelaksanaan Magang

NO	Program	Kegiatan	Hal-Hal yang diperoleh
1	Riset Data Informasi Kasus Korupsi di NTB	Kliping Koran Suara NTB, Metropolis dan LombokPost	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dapat memberikan informasi tentang kasus korupsi yang sedang terjadi di NTB, seperti jenis kasus, kronologis kejadian, serta pelaku dan korban yang terlibat dalam kasus tersebut.</li><li>2. Mengetahui seberapa sering kasus korupsi terjadi di NTB dan apakah jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu.</li><li>3. Dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan kita terhadap kasus korupsi di NTB serta opini kita mengenai tindakan yang sebaiknya diambil untuk mengatasi masalah</li></ol>

			<p>tersebut.</p> <p>4. Memberikan informasi tentang perkembangan kasus korupsi yang sedang berjalan di NTB seperti apakah pelaku sudah ditangkap atau tidak, bagaimana proses hukum berjalan, serta hasil putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.</p> <p>5. Hasil riset dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kasus korupsi yang terungkap. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa para pelaku korupsi ditindak sesuai dengan hukum.</p> <p>6. Hasil riset data yang diterbitkan dalam koran atau media massa dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memerangi korupsi. Hal ini dapat membantu menciptakan tekanan publik</p>
--	--	--	---

			<p>yang dapat mendorong pihak berwenang untuk lebih aktif dalam menangani masalah korupsi.</p> <p>7. Memberikan gambaran tentang dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh kasus korupsi di NTB, seperti kerugian yang dialami oleh negara dan masyarakat, serta dampak psikologis yang dialami oleh korban.</p> <p>8. Dapat membantu untuk mengumpulkan informasi tentang identitas pelaku-pelaku korupsi yang terjadi di NTB seperti jabatan,nama, atau institusi yang terlibat.</p> <p>9. Dapat membantu untuk mengidentifikasi jenis-jenis kasus korupsi yang terjadi di NTB, misalnya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,penyuapan atau tindak pidana pencucian uang.</p> <p>10. Membantu dalam</p>
--	--	--	---

			<p>pengembangan strategi pencegahan korupsi di ntb. Hal ini dapat membantu pihak berwenang dalam meningkatkan transparansi,akuntabilitas, dan pengawasan terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat.</p> <p>11. Belajar bagaimana melakukan riset dan pengumpulan data terkait dengan masalah korupsi, transparansi dan akuntabilitas.</p> <p>12. Memahami lebih dalam tentang masalah transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik di Nusa Tenggara Barat</p> <p>13. Mengembangkan keterampilan dalam melakukan audit terhadap lembaga-lembaga pemerintah daerah dan memastikan trans paransi dan akuntabilitas</p>
--	--	--	---

			terjaga.
2	Pendalam metodologi riset berkaitan dengan BUMDES	FGD tentang persiapan turun lapangan penelitian mengenai Implementasi dan Akuntabilitas BUMDES	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan prinsip penelitian</li> <li>2. Mempelajari berbagai metode penelitian seperti survei wawancara, dan observasi.</li> <li>3. Meningkatkan pemahaman tentang BUMDES.</li> <li>4. Mempelajari teknik analisis data yang tepat.</li> <li>5. Memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana orang berpikir dan merasa tentang suatu topik</li> <li>6. Untuk mengetahui pendapat dari setiap kelompok tentang bagaimana suatu topik.</li> <li>7. Menghasilkan ide-ide baru atau untuk mengeksplorasi</li> </ol>

			perspektif yang berbeda tentang suatu masalah
3	Riset BUMDES	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara pengurus BUMDES</li> <li>2. Pengumpulan data sekunder</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui cara atau sistem rekrutmen BUMDES</li> <li>2. Mengetahui potensi desa</li> <li>3. Mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang Bumdes. Wawancara dengan pengurus Bumdes dapat memberikan informasi yang lebih mendalam tentang tujuan, visi, misi, dan aktivitas yang dilakukan oleh Bumdes. Selain itu, pengumpulan data sekunder seperti dokumen, laporan keuangan, dan peraturan juga dapat memberikan informasi tambahan tentang Bumdes yang tidak diperoleh melalui wawancara.</li> <li>4. Memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Bumdes. Melalui wawancara dengan</li> </ol>

			<p>pengurus Bumdes, peneliti dapat memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Bumdes dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja Bumdes.</p> <p>5. Mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap Bumdes. Wawancara dengan pengurus Bumdes juga dapat memberikan informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap Bumdes. Hal ini dapat membantu Bumdes untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.</p> <p>6. Memperoleh data yang valid dan dapat diandalkan. Dengan melakukan</p>
--	--	--	---

			<p>wawancara dan pengumpulan data sekunder, peneliti dapat memperoleh data yang valid dan dapat diandalkan. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Bumdes serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerjanya.</p> <p>7. Mengetahui persepsi dan pandangan pengurus Bumdes. Wawancara dengan pengurus Bumdes dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang persepsi, pandangan, dan opini pengurus Bumdes tentang Bumdes. Hal ini dapat membantu peneliti untuk memahami tantangan, hambatan, dan faktor keberhasilan yang dihadapi oleh Bumdes.</p> <p>8. Memperoleh data yang lebih beragam dan</p>
--	--	--	--

			<p>representatif. Dengan melakukan wawancara dengan pengurus Bumdes, peneliti dapat memperoleh data dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, seperti pengurus Bumdes yang bertanggung jawab atas keuangan, pengurus yang bertanggung jawab atas pemasaran, atau pengurus yang bertanggung jawab atas produksi. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih beragam dan representatif.</p> <p>9. Memperoleh data yang valid dan dapat diandalkan. Dalam wawancara dengan pengurus Bumdes, peneliti dapat mengecek dan memverifikasi data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memastikan keabsahan data yang diperoleh. Selain itu, dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, peneliti dapat</p>
--	--	--	---

			<p>memperoleh data yang lebih diverifikasi dan terpercaya.</p> <p>10. Mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Bumdes. Dengan melakukan wawancara pengurus Bumdes, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur, fungsi, dan kegiatan Bumdes. Sementara itu, dengan melakukan pengumpulan data sekunder, peneliti dapat memperoleh data yang terkait dengan kinerja Bumdes seperti laporan keuangan dan laporan tahunan. Memahami tujuan dan pengelolaan Bumdes. Wawancara dengan pengurus Bumdes dapat membantu peneliti memahami tujuan pendirian Bumdes serta pengelolaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Bumdes. Hal ini akan membantu peneliti</p>
--	--	--	---

			<p>untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat dan mengumpulkan data yang relevan.</p> <p>11. Meningkatkan pemahaman tentang kondisi desa. Dalam wawancara dengan pengurus Bumdes, peneliti juga dapat memperoleh informasi tentang kondisi desa secara umum. Hal ini akan membantu peneliti memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di desa yang dapat berpengaruh pada pengelolaan Bumdes.</p> <p>12. Mendapatkan informasi terbaru tentang Bumdes. Wawancara dengan pengurus Bumdes dapat memberikan informasi terbaru tentang kegiatan, program, dan proyek yang sedang dilakukan oleh Bumdes. Hal ini akan membantu peneliti memperoleh data yang relevan dan up-to-date tentang Bumdes.</p>
--	--	--	--

			<p>13. Memperoleh perspektif pengurus Bumdes. Wawancara dengan pengurus Bumdes dapat membantu peneliti memperoleh perspektif dari sudut pandang pengurus Bumdes tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola Bumdes. Hal ini akan membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Bumdes dan tantangan yang dihadapinya.</p> <p>14. Memperoleh data sekunder yang relevan. Pengumpulan data sekunder dapat membantu peneliti memperoleh data yang relevan tentang Bumdes dari sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder seperti dokumen, laporan, dan publikasi dapat memberikan informasi yang penting tentang kegiatan, program, dan proyek yang</p>
--	--	--	---

			<p>sedang dilakukan oleh Bumdes. Hal ini akan membantu peneliti untuk mendapatkan data yang lengkap dan up-to-date tentang Bumdes.</p> <p>15. Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dari Bumdes. Dalam melakukan wawancara dengan pengurus Bumdes, peneliti dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dari Bumdes dalam penelitian. Dengan membangun hubungan yang baik dengan pengurus Bumdes, peneliti dapat membuka pintu untuk kolaborasi yang lebih baik di masa depan.</p>
4	Sosialisasi Evaluasi RUED	FGD tentang Implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) di NTB	<p>1. Mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dan stakeholder terhadap RUED. Dalam FGD, masyarakat dan stakeholder dapat memberikan masukan dan pandangan terhadap RUED, serta memberikan umpan</p>

			<p>balik tentang implementasi RUED di wilayah tersebut. Hal ini dapat membantu penilaian tentang seberapa efektif RUED dalam membangun kesadaran masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya pengelolaan energi yang berkelanjutan di NTB.</p> <p>2. Memperoleh informasi tentang kendala dan tantangan dalam implementasi RUED. FGD juga dapat memberikan informasi tentang kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi RUED di NTB. Hal ini akan membantu penilaian tentang seberapa efektif RUED dalam mengatasi kendala dan tantangan yang muncul dalam implementasinya.</p> <p>3. Mengetahui tingkat partisipasi stakeholder dalam implementasi RUED. Dalam FGD, stakeholder</p>
--	--	--	--

			<p>seperti pemerintah, pengusaha, akademisi, dan masyarakat dapat memberikan masukan tentang tingkat partisipasi mereka dalam implementasi RUED di NTB. Hal ini akan membantu penilaian tentang seberapa besar partisipasi stakeholder dalam implementasi RUED dan sejauh mana partisipasi tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi RUED di wilayah tersebut.</p> <p>4. Mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan dalam implementasi RUED. FGD dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan kekurangan dalam implementasi RUED di NTB. Hal ini akan membantu penilaian tentang sejauh mana RUED telah berhasil mencapai tujuan dan</p>
--	--	--	---

			<p>sasaran yang diinginkan, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi.</p> <p>5. Merumuskan rekomendasi untuk perbaikan implementasi RUED di masa depan. Berdasarkan masukan dan umpan balik yang diberikan dalam FGD, evaluasi RUED dapat merumuskan rekomendasi untuk perbaikan implementasi RUED di masa depan. Hal ini akan membantu pemerintah dan stakeholder untuk memperbaiki implementasi RUED dan mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.</p> <p>6. Memahami implementasi RUED di NTB. Dalam FGD tersebut, peserta dapat memahami secara mendalam bagaimana implementasi RUED di NTB dilaksanakan. Hal ini akan membantu evaluasi</p>
--	--	--	---

			<p>kebijakan energi di NTB dan dapat memberikan masukan untuk perbaikan implementasi RUED.</p> <p>7. Mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam FGD, peserta yang berasal dari berbagai pihak seperti pengusaha, akademisi, dan pemerintah daerah dapat memberikan masukan dan perspektif yang beragam mengenai implementasi RUED. Hal ini akan membantu evaluasi kebijakan energi di NTB menjadi lebih komprehensif dan menggambarkan sudut pandang yang berbeda.</p> <p>8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan energi. Melalui FGD, masyarakat dapat berpartisipasi dalam evaluasi kebijakan energi di NTB dan memberikan masukan mengenai kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini akan</p>
--	--	--	---

			<p>membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan energi dan memperkuat pengambilan keputusan yang demokratis.</p> <p>9. Memperkuat jaringan antar pemangku kepentingan. Melalui FGD, peserta dapat membangun jaringan antar pemangku kepentingan dalam bidang energi di NTB. Hal ini akan membantu memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mengembangkan dan menjalankan kebijakan energi di daerah.</p> <p>10. Menyediakan masukan untuk perbaikan RUED di masa depan. Evaluasi kebijakan energi melalui FGD dapat memberikan masukan untuk perbaikan RUED di masa depan. Hal ini akan membantu mengembangkan RUED yang lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di NTB.</p>
--	--	--	--

			<p>11. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dengan melakukan evaluasi dan FGD terhadap implementasi RUED di NTB, peneliti dapat membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RUED di NTB. Hal ini akan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan RUED di NTB.</p> <p>12. Meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan energi di NTB. FGD ini dapat memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang kebijakan energi di NTB dan bagaimana program RUED dapat diimplementasikan secara efektif di daerah mereka.</p>
--	--	--	--

Sumber : Data diolah Tahun 2023

### 1.2 Kendala :

Keterbatasan akses informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas terkait transparansi dan akuntabilitas di Nusa Tenggara Barat. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam melakukan riset dan pengumpulan data terkait dengan masalah tersebut. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia pada organisasi dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan oleh SOMASI NTB. Terkadang terdapat hambatan dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga pemerintah daerah, yang dapat menghambat pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan SOMASI NTB.

Kendala pribadi :  
1. Keterbatasan data  
2. kurangnya dukungan  
3. keterbatasan waktu  
4. keterbatasan teknis

Kendala Kelembagaan:  
1. Keterlambatan akses pintu gerbang  
2. Keterbatasan kesempatan magang  
3. Kurangnya pengawasan  
4. Kurangnya dukungan dan fasilitas  
5. kurangnya komunikasi dan kordinasi

Kendala Komunikasi:  
1. Masih terlalu kaku dalam komunikasi  
2. keterbatasan akses informasi  
3. Perbedaan jadwal masih sering miskom  
dalam ` akses pintu gerbang  
4. Kurangnya pengalaman

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Melalui magang di SOMASI NTB, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dan pemahaman yang lebih baik terkait transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Dalam pelaksanaan magang, mahasiswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan program yang dijalankan oleh SOMASI NTB, serta menunjukkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Dalam magang ini, mahasiswa juga dapat mempelajari struktur organisasi SOMASI NTB, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing divisi, serta berinteraksi dengan berbagai pihak yang terkait dengan organisasi tersebut. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam terkait dengan peran dan fungsi lembaga masyarakat sipil dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

## 4.2 Saran

Memperkuat kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan untuk meningkatkan akses informasi dan memperluas jaringan kerja SOMASI NTB. Menyediakan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif bagi mahasiswa magang, terutama dalam hal pengumpulan dan analisis data terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Menjalin hubungan yang lebih erat dengan perguruan tinggi dan universitas di Nusa Tenggara Barat untuk mempromosikan magang di SOMASI NTB dan meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam program tersebut. Memperkuat program mentoring dan evaluasi yang terus-menerus untuk memastikan bahwa mahasiswa magang mendapatkan pengalaman dan manfaat yang optimal dari magang di SOMASI NTB.

## LAMPIRAN

Penarikan mahasiswa magang



FGD mengenai riset BUMDES

1. Dekonstruksi BUMDes 1000

Aspek	Problem
SDM →	- SDM Rangkap/tdk berkwalitas - Tidak Pengetahuan
2. Jenis Usaha →	Kemampuan utk mengidentifikasi Peta Desa - Diorganisasi Uluha
3. Tata Kelola →	- Kelembagaan - Kontrol masyarakat/Kelembagaan - Perencanaan sumber modal
4. Pembiayaan →	
5. Partisipasi →	Sudut pandang → Kontribusi - Partisipasi - Partisipasi - Partisipasi
6. Legalitas →	

Role model

- Perencanaan
- Kelembagaan
- Partisipasi
- Pembiayaan
- Kontrol masyarakat

Resilience

- Partisipasi
- Kelembagaan
- Pembiayaan
- Kontrol masyarakat

BUMDes → UU No 6/2014

OTONOMI Desa/Kab. → Pasal 87

→ Kemandirian desa

→ Desa yg berdaya

→ 1. Kesejahteraan masyarakat

→ 2. Politik

→ 3. Ekonomi

→ 3. Kebudayaan

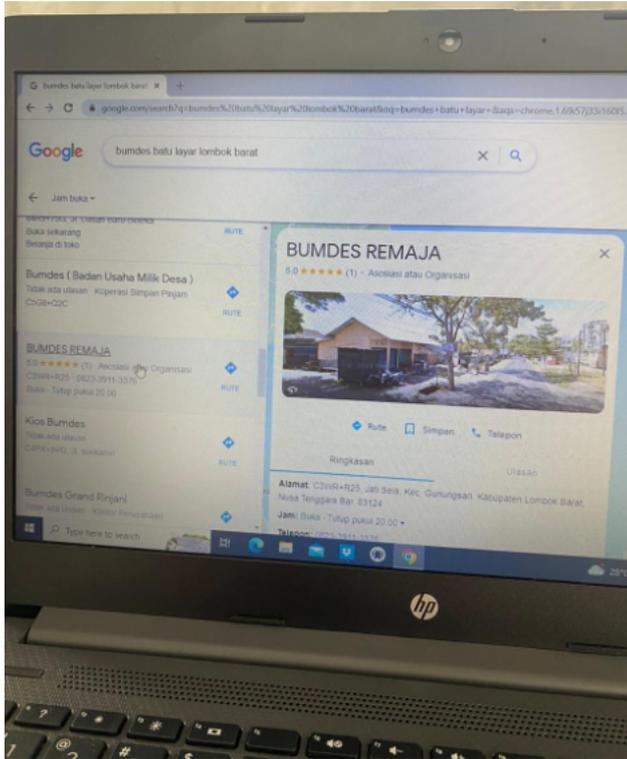
→ Kemandirian desa → Ekonomi (PNPM)

→ Pembinaan masyarakat

→ Partisipasi masyarakat → Perencanaan

→ Pembangunan Desa → Evaluasi

Mengidentifikasi Lokasi Wawancara/ Riset BUMDES



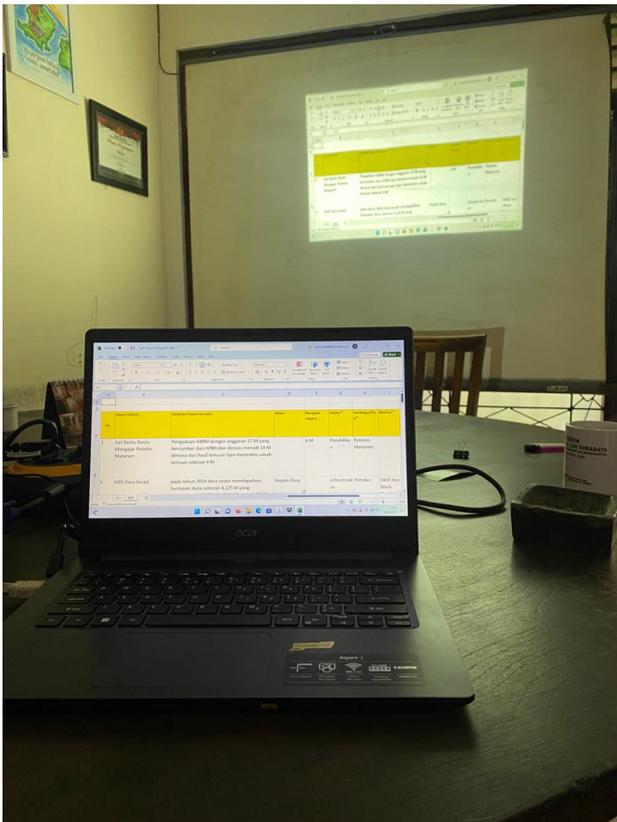
## Turun Lapangan Wawancara BUMDES



## Evaluasi Implementasi RUED DI NTB



Kliping Koran Dan Nginput Data Korupsi Tahun 2021-2022 Di NTB



Lampiran agenda harian dan presensi kehadiran

Lampiran:

Persensi Kehadiran Peserta Magang

Nama : KRISNA FEBRIANSYAH  
 Nim : 2020B1D036  
 Bulan ke : I (satu)  
 Lokasi magang : SOMASI NTB

No	Hari/Tanggal	Masuk		Keluar		Keterangan
		Jam	Paraf	Jam	Paraf	
1	Selasa, 31 Januari 2023	10.00	<i>Krisna</i>	17.00	<i>Krisna</i>	Hadir
2	Rabu, 1 Februari 2023	09.00	<i>Krisna</i>	17.00	<i>Krisna</i>	Hadir
3	Kamis, 2 Februari 2023	09.00	<i>Krisna</i>	17.00	<i>Krisna</i>	Hadir
4	Jumat, 3 Februari 2023	09.00	<i>Krisna</i>	17.00	<i>Krisna</i>	Hadir
5	Senin, 6 Februari 2023	09.00	<i>Krisna</i>	17.00	<i>Krisna</i>	Hadir
6	Selasa, 7 Februari 2023	09.00	<i>Krisna</i>	17.00	<i>Krisna</i>	Hadir
7	Rabu, 8 Februari 2023	09.00	<i>Krisna</i>	17.00	<i>Krisna</i>	Hadir
8	Kamis, 9 Februari 2023	09.00	<i>Krisna</i>	17.00	<i>Krisna</i>	Hadir
9	Jumat, 10 Februari 2023	09.00	<i>Krisna</i>	17.00	<i>Krisna</i>	Hadir
10	Senin, 13 Februari 2023	09.00		17.00		Sakit/Izin
11	Selasa, 14 Februari 2023	09.00	<i>Krisna</i>	17.00	<i>Krisna</i>	Hadir
12	Rabu, 15 Februari 2023	09.00	<i>Krisna</i>	17.00	<i>Krisna</i>	Hadir
13	Kamis, 16 Februari 2023	09.00	<i>Krisna</i>	17.00	<i>Krisna</i>	Hadir

14	Jumat, 17 Februari 2023	09.00	Ju	17.00	Ju	Hadir
15	Senin, 20 Februari 2023	09.00	Ju	17.00	Ju	Hadir
16	Selasa, 21 Februari 2023	09.00	Ju	17.00	Ju	Hadir
17	Rabu, 22 Februari 2023	09.00	Ju	17.00	Ju	Hadir
18	Kamis, 23 Februari 2023	09.00	Ju	17.00	Ju	Hadir
19	Jumat, 24 Februari 2023	09.00	Ju	17.00	Ju	Hadir
20	Senin, 27 Februari 2023	09.00	Ju	17.00	Ju	Hadir
21	Selasa, 28 Februari 2023	09.00	Ju	17.00	Ju	Hadir
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

Matarani, 30 Januari 2023

Pendamping pada Instansi

  
(Dwi Arie Santo)

Lampiran:

Persensi Kehadiran Peserta Magang

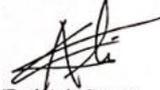
Nama : KRISNA FEBRIANSYAH  
Nim : 2020B1D036  
Bulan ke : II (dua)  
Lokasi magang : SOMASI NTB

No	Hari/Tanggal	Masuk		Keluar		Keterangan
		Jam	Paraf	Jam	Paraf	
1	Rabu, 1 Maret 2023	09.00	<i>Jun</i>	17.00	<i>Jun</i>	Hadir
2	Kamis, 2 Maret 2023	09.00	<i>Jun</i>	17.00	<i>Jun</i>	Hadir
3	Jumat, 3 Maret 2023	09.00	<i>Jun</i>	17.00	<i>Jun</i>	Hadir
4	Senin, 6 Maret 2023	09.00	<i>Jun</i>	17.00	<i>Jun</i>	Hadir
5	Selasa, 7 Maret 2023	09.00	<i>Jun</i>	17.00	<i>Jun</i>	Hadir
6	Rabu, 8 Maret 2023	09.00	<i>Jun</i>	17.00	<i>Jun</i>	Hadir
7	Kamis, 9 Maret 2023	09.00	<i>Jun</i>	17.00	<i>Jun</i>	Hadir
8	Jumat, 10 Maret 2023	09.00	<i>Jun</i>	17.00	<i>Jun</i>	Hadir
9	Senin, 13 Maret 2023	09.00	<i>Jun</i>	17.00	<i>Jun</i>	Hadir
10	Selasa, 14 Maret 2023	09.00	<i>Jun</i>	17.00	<i>Jun</i>	Hadir
11	Rabu, 15 Maret 2023	09.00	<i>Jun</i>	17.00	<i>Jun</i>	Hadir
12	Kamis, 16 Maret 2023	09.00	<i>Jun</i>	17.00	<i>Jun</i>	Izin
13	Jumat, 17 Maret 2023	09.00	<i>Jun</i>	17.00	<i>Jun</i>	Hadir

14	Senin, 20 Maret 2023	09.00	Ju	17.00	Ju	Hadir
15	Selasa, 21 Maret 2023	09.00	Ju	17.00	Ju	Hadir
16	Rabu, 22 Maret 2023	09.00	Ju	17.00	Ju	Hadir/Libur
17	Kamis, 23 Maret 2023	09.00	Ju	17.00	Ju	Hadir/Libur
18	Jumat, 24 Maret 2023	09.00		17.00		Izin
19	Senin, 27 Maret 2023	09.00	Ju	17.00	Ju	Hadir
20	Selasa, 28 Maret 2023	09.00	Ju	17.00	Ju	Hadir
21	Rabu, 29 Maret 2023	09.00	Ju	17.00	Ju	Hadir
22	Kamis, 30 Maret 2023	09.00	Ju	17.00	Ju	
23	Jumat, 31 Maret 2023	09.00	Ju	17.00	Ju	
24						
25						
26						
27						
28						
29						

Mataram, 30 Januari 2023

Pendamping pada Instansi

  
(Dwi Arie Santo)

Lampiran:

Agenda Harian Peserta Magang

Nama : KRISNA FEBRIANSYAH

NIM : 2020B1D036

Bulan ke : I (satu)

Lokasi magang : SOMASI NTB

No	Hari/Tanggal	Agenda Harian		
		Jenis Kegiatan	Paraf Pembibig Magang	Keterangan
1	Selasa, 31 Jan 2023	Sorialisasi dan arahan dari Drr. Samudra		Hadir
2	Rabu, 1 Feb 2023	Melihat/membaca INFO anggaran NTB		Hadir
4	Kamis, 2 Feb 2023	Membuat Power point mengenai anti korupsi		Hadir
5	Jumat, 3 Feb 2023	Membuat PPT terkait dengan tata kelola dan akuntabilitas pppg		Hadir
6	Senin, 6 Feb 2023	Membuat Power point mengenai GOOD GOVERnance		Hadir
7	Selasa, 7 Feb 2023	Menganalisa terkait dengan isu perpanjangan masa jabatan KADES		Hadir
8	Rabu, 8 Feb 2023	Menentukan lokasi riset yang akan diwawancarai		Hadir
9	kamis, 9 Feb 2023	Mengidentifikasi lokasi riset Bumdes		Hadir
10	Jumat, 10 Feb 2023	FGD Hari Pertama/penyusunan materi soal untuk lapangan		Hadir
11	Senin, 13 Feb 2023	FGD Hari Kedua dari dosen pembimbing		Sakit/izin
12	Selasa, 14 Feb 2023	Menentukan Narasumber wawancara mengenai Bumdes		Hadir
13	Rabu, 15 Feb 2023	Menentukan lokasi wawancara terkait Bumdes		Hadir
14	Kamis, 16 Feb 2023	membaca koran/mengambil isu kasus korupsi di tahun 2021-2022 yang akan dikaji menjadi data H-1		Hadir
15	Jumat, 17 Feb 2023	Hari kedua		Hadir

16	Senin, 20 feb 2023	Hari ketiga		Hadir
17	Selasa, 21 feb 2023	Hari keempat		Hadir
18	Rabu, 22 feb 2023	Hari kelima		Hadir
19	Kamis, 23 feb 2023	Hari keenam		Hadir
20	Jumat, 24 feb 2023	Hari ke-7 selesai dan akan dilanjutkan dlm bentuk <del>etc</del>		Hadir
21	Senin, <del>25</del> 27 feb 2023	Pengantaran Surat ke lokasi H-1 (Gunung Sari)		Hadir
22	Selasa, <del>26</del> 28 feb 2023	Pengantaran Surat H-2 ke (Labuapi) Iohar		Hadir
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

Motaram 30 Januari 2023

Lampiran:

Agenda Harian Peserta Magang

Nama : KRISNA FEBRIANSYAH

NIM : 2020B1D036

Bulan ke : II (dua)

Lokasi magang : SOMASI NTB

No	Hari/Tanggal	Agenda Harian		
		Jenis Kegiatan	Paraf Pembibig Magang	Keterangan
1	Rabu, 1 Maret 2023	Mengirimkan surat balasan surat izin wawancara ke KADES Gunung Sari, Lombok.		Hadir
2	Kamis, 2 Maret 2023	Wawancara hari pertama dengan Ketua BUMDES Gunung Sari		Hadir
4	Jumat, 3 Maret 2023	Wawancara hari kedua dengan BPD Gunung Sari		Hadir
5	Senin, 6 Maret 2023	Kegiatan:		Hadir
6	Selasa, 7 Maret 2023	Evaluasi pelaksanaan RUCED di NTB: di Hotel Prime Park		Hadir
7	Rabu, 8 Maret 2023	Wawancara dengan tokoh masyarakat Gunung Sari		Hadir
8	Kamis, 9 Maret 2023	Wawancara hari ke-3 dengan Ketua BUMDES LABUAPI		Hadir
9	Jumat, 10 Maret 2023	Membahas hasil wawancara Riset		Hadir
10	Senin, 13 Maret 2023	Mereduksi audio wawancara ke word		Hadir
11	Selasa, 14 Maret 2023	Mem buat hasil wawancara ke word		Hadir
12	Rabu, 15 Maret 2023	Mengumpulkan data sekunder wawancara		Hadir
13	Kamis, 16 Maret 2023			Izin
14	Jumat, 17 Maret 2023	Evaluasi H-1 hasil wawancara dgn dosen		Hadir
15	Senin, 20 Maret 2023	Evaluasi H-2		Hadir

16	Selasa, 21 Maret 2023			Hadir
17	Rabu, 22 Maret 2023			Libur
18	Kamis, 23 Maret 2023			Libur
19	Jumat, 24 Maret 2023			Libur
20	Senin, 27 Maret 2023	menganalisa hasil wawancara H-1		Hadir
21	Selasa, 28 Maret 2023	H-2		Hadir
22	Rabu, 29 Maret 2023	Evaluasi hasil akhir		Hadir
23	Kamis, 30 Maret 2023	Penarikan magang		Hadir
24	Jumat, 31 Maret 2023	Penarikan resmi		Hadir
25				
26				
27				
28				
29				

Mataram, 30 Januari 2023